

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini penulis menyajikan tinjauan pustaka yang nantinya akan menjadi landasan dari kerangka pemikiran dan hipotesis yang diajukan dalam rangka menjelaskan dasar konsep mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, lalu diikuti dengan penelitian terdahulu. Pada bagian ini juga akan membahas kerangka pemikiran mengenai model variabel disertai dengan pengajuan hipotesisnya.

2.1.1. Jumlah Pengangguran Terdidik

2.1.1.1. Pengertian Pengangguran

Dari perspektif makroekonomi, pengangguran dianggap sebagai salah satu indikator terpenting ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja. Rizka Rahmayani mendefinisikan pengangguran sebagai situasi di mana individu yang merupakan bagian dari angkatan kerja bersedia bekerja dan menerima upah yang berlaku namun belum menemukan pekerjaan yang sesuai (Rahmayani, 2024). Fenomena ini tidak hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga menandakan ketidakefisienan dalam perekonomian, di mana pertumbuhan ekonomi regional belum mampu menciptakan permintaan tenaga kerja yang sebanding dengan peningkatan populasi usia kerja. Raden dan Riko (Rusydan & Wijaya, 2024) menekankan bahwa situasi ini mencerminkan kesenjangan antara pasokan pekerjaan formal yang terbatas dan pasokan pekerja baru yang terus meningkat, terutama akibat bonus demografi.

Untuk mengukur tingkat pengangguran secara kuantitatif, Badan Pusat Statistik menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT

didefinisikan sebagai persentase orang yang menganggur dari total jumlah orang dalam angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2024). Pengangguran terbuka merupakan jumlah orang yang merupakan bagian dari angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka mencakup mereka yang sedang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya maupun yang pernah bekerja sebelumnya, termasuk pengangguran terdidik yang merupakan bagian dari pengangguran terbuka itu sendiri. Pengangguran terdidik disini ialah mereka yang sudah menempuh pendidikan dan sedang mencari pekerjaan.

Pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang muncul ketika tenaga kerja dengan pendidikan menengah dan tinggi, seperti lulusan SMA, pemegang diploma, dan lulusan perguruan tinggi, tidak dapat diserap secara optimal oleh pasar tenaga kerja. Fatma Shafira N.R. (Ramadhani, 2021) menjelaskan bahwa fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh kekurangan lowongan pekerjaan, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta perbedaan antara harapan gaji pencari kerja dengan gaji yang ditawarkan.

Selain itu, tenaga kerja terampil cenderung menunda masuk ke pasar tenaga kerja, yaitu mereka memilih untuk menunda masuk ke pasar tenaga kerja sambil menunggu pekerjaan yang dianggap sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Leni dan Whinarko (Anjarwati & Juliprijanto, 2021) berargumen bahwa tingginya tingkat pengangguran di kalangan kelompok terampil mencerminkan transformasi investasi pendidikan yang masih belum

optimal menjadi peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja di ekonomi regional.

Ketika populasi meningkat secara cepat sementara peluang kerja tidak meningkat, tingkat pengangguran akan naik. Dalam teori pasar tenaga kerja bebas, pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara ukuran angkatan kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Pengangguran terbuka terdiri dari:

1. Orang yang sedang mencari pekerjaan.
2. Orang yang sedang mempersiapkan diri untuk memulai usaha.
3. Orang yang kesulitan menemukan pekerjaan.
4. Orang yang belum pernah bekerja dan tidak memiliki pekerjaan.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) memberikan gambaran umum tentang situasi ketenagakerjaan, indikator agregat ini seringkali menyembunyikan masalah struktural yang lebih spesifik. Di Provinsi Jawa Barat, salah satu fenomena yang paling mencolok adalah kontribusi yang besar dari kelompok berpendidikan tinggi terhadap tingkat TPT. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran tidak hanya mempengaruhi pekerja dengan keterampilan rendah, tetapi juga lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada fenomena pengangguran berpendidikan.

Menurut Fatma Shafira N.R. (Ramadhani, 2021), pengangguran terkait pendidikan didefinisikan sebagai situasi di mana pekerja dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi, terutama lulusan diploma atau sarjana, belum menemukan tempat di pasar tenaga kerja. Berbeda dengan pengangguran umum yang sering

dikaitkan dengan kurangnya kualifikasi, pengangguran di kalangan orang terpelajar lebih mungkin disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan lulusan dan persyaratan industri, serta fenomena “pengangguran menunggu,” yaitu kecenderungan menunda pencarian kerja untuk menunggu posisi yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan harapan gaji. Polanya ini biasanya tidak terlihat di kalangan pekerja dengan keterampilan rendah, yang lebih fleksibel dalam mencari pekerjaan yang tersedia.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fluktuasi tingkat pengangguran diawali dari dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Menurut Sonny S. (Sumarsono, 2009), kemampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja, yang pada akhirnya menentukan tingkat pengangguran, ditentukan oleh bagaimana permintaan tenaga kerja di sektor riil bertemu dan berinteraksi dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Dengan kata lain, pengangguran mencerminkan keseimbangan atau ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dan pasokan tenaga kerja yang ada atau dalam kata lain disebut dengan mekanisme Teori Pasar Tenaga Kerja (*Labor Market Theory*).

Dasar teoretis utama untuk penelitian ini adalah Teori Pasar Tenaga Kerja. Teori ini menyatakan bahwa pasar tenaga kerja dibentuk oleh interaksi antara permintaan tenaga kerja dari sektor industri dan penawaran tenaga kerja dari populasi pekerja. Raden dan Riko menegaskan dalam studi mereka bahwa keseimbangan di pasar tenaga kerja sebagian besar ditentukan oleh kemampuan

sektor ekonomi untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia (Rusydan & Wijaya, 2024).

Berdasarkan kerangka teoritis ini, pengangguran timbul sebagai akibat ketidakseimbangan (ketidakseimbangan) antara jumlah pekerja dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Ketika pasokan tenaga kerja meningkat tanpa disertai perluasan lapangan kerja, terutama di sektor formal, terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja. Situasi ini pada akhirnya menyebabkan peningkatan pengangguran terbuka, sebagaimana dikonfirmasi oleh Raden dan Riko (Rusydan & Wijaya, 2024).

Dari perspektif permintaan tenaga kerja, fluktuasi tingkat pengangguran juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan lapangan kerja melalui aktivitas ekonomi. Studi oleh Rizka (Rahmayani, 2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan produk domestik bruto memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja. Ketika ekonomi mengalami perlambatan atau kontraksi, kemampuan sektor riil untuk menyerap tenaga kerja juga melemah, yang mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor kunci yang menjelaskan perbedaan temporal dan regional dalam tingkat pengangguran.

Dari sisi penawaran tenaga kerja, perkembangan demografis dan kualitas sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam tingkat pengangguran. Raden dan Riko (Rusydan & Wijaya, 2024). menjelaskan bahwa peningkatan angkatan kerja yang tidak disertai dengan perluasan peluang kerja formal akan

menyebabkan kelebihan pasokan tenaga kerja dan dengan demikian meningkatkan tingkat pengangguran.

Selain mekanisme pasar, yang beroperasi melalui interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja, peran pemerintah melalui kebijakan fiskalnya juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dalam kerangka teori Keynesian, pengeluaran regional dianggap sebagai alat stimulus yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat. Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah, baik untuk pengembangan infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa, dapat memiliki efek multiplier yang merangsang aktivitas ekonomi di sektor riil. Peningkatan aktivitas produksi akibat pengeluaran lokal ini akan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja dan secara langsung atau tidak langsung menciptakan lapangan kerja baru. Situasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, termasuk pekerja yang terampil, yang tersedia di pasar tenaga kerja, sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran (Ma'ruf & Andriansyah, 2022).

Terakhir, kebijakan upah minimum juga merupakan faktor yang mempengaruhi keseimbangan di pasar tenaga kerja. Penelitian oleh Priska dan Ririt menunjukkan bahwa dalam konteks Jawa Barat, upah minimum tidak hanya dianggap sebagai faktor biaya bagi perusahaan, tetapi juga sebagai alat politik yang dapat mempengaruhi efisiensi tenaga kerja dan keputusan perusahaan dalam merekrut karyawan baru (Amarta & Setiawati, 2025). Oleh karena itu, kebijakan upah minimum dapat memperkuat atau melemahkan kapasitas penyerapan pasar tenaga kerja, tergantung pada kondisi ekonomi yang berlaku.

Secara keseluruhan, interaksi antara pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, kebijakan upah minimum dan belanja daerah yang menjadi salah satu faktor yang menentukan dinamika jumlah pengangguran terdidik di Jawa Barat dan menjadi lebih kompleks karena fenomena tenaga kerja terdidik di Jawa Barat masih banyak terjadi *skill mismatch* antara industri dan tenaga kerja juga adanya ekspektasi upah tinggi dari tenaga kerja terdidik.

2.1.1.2. Teori Pengangguran

Beberapa teori menjelaskan penyebab pengangguran, termasuk:

1. Teori Klasik

Menurut teori ini, pengangguran dapat diatasi melalui mekanisme pasar bebas. Ketika ada kelebihan tenaga kerja, upah akan turun hingga tercapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

2. Teori Keynesian

Teori ini menjelaskan bahwa pengangguran disebabkan oleh permintaan agregat yang rendah. Penurunan konsumsi publik menyebabkan penurunan produksi, bukan karena kekurangan tenaga kerja. Penurunan upah sebenarnya mengurangi daya beli dan mengurangi permintaan barang, menyebabkan produsen mengalami kerugian dan tidak dapat meningkatkan tenaga kerjanya.

2.1.1.3. Jenis-jenis Pengangguran

Menurut Kusumadewi et al., pengangguran dapat dipahami dari berbagai sudut pandang yaitu, berdasarkan penyebab dan karakteristiknya (Kusumadewi et al., 2023).

Salah satunya ialah berdasarkan penyebabnya untuk mengetahui alasan mengapa seseorang atau tenaga kerja tidak terserap oleh pasar kerja:

a. Pengangguran Friksional

Terjadi akibat perpindahan pekerja yang mencari pekerjaan baru dengan upah lebih tinggi.

b. Pengangguran Siklus

Terjadi akibat fluktuasi siklus ekonomi. Ketika permintaan barang menurun, perusahaan mengurangi produksi dan memberhentikan pekerja.

c. Pengangguran Struktural

Disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi yang membutuhkan keterampilan baru, sementara tenaga kerja tidak mampu beradaptasi.

d. Pengangguran Teknologi

Terjadi akibat penggunaan mesin dan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses produksi.

Selain dari penyebabnya, ada juga berdasarkan karakteristik yang menunjukkan bagaimana keterlibatan pekerja dalam kegiatan ekonomi:

a. Pengangguran Terbuka

Terjadi ketika jumlah pekerja melebihi kesempatan kerja yang tersedia.

b. Pengangguran Tersembunyi

Terjadi ketika jumlah pekerja yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi melebihi permintaan sebenarnya.

c. Pengangguran Musiman

Terjadi akibat perubahan musim, misalnya, pekerja karet yang tidak dapat bekerja selama musim hujan.

d. Pengangguran Setengah Waktu

Dirasakan oleh pekerja yang bekerja sangat sedikit, misalnya, hanya satu hingga dua hari seminggu atau beberapa jam sehari.

2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1. Pengertian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemajuan suatu perekonomian. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan produksi barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Ukuran pertumbuhan ekonomi biasanya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam satu tahun.

2.1.2.2. Teori Laju Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa mekanisme pasar secara alami mengarahkan sistem ekonomi menuju keseimbangan. Keseimbangan ini dicapai melalui interaksi antara penawaran dan permintaan, dengan harga dan upah berfungsi sebagai sinyal paling penting dalam distribusi sumber daya. Dalam model ini, intervensi pemerintah dianggap tidak perlu, karena diasumsikan bahwa pasar dapat menyesuaikan diri secara otomatis. Analisis ekonomi klasik

berfokus terutama pada proses produksi, distribusi pendapatan, dan peran biaya produksi dalam menentukan nilai barang dan jasa (Rahman, 2016). Beberapa ahli yang mengemukakan teori ini antara lain:

- a) Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi jika jumlah penduduk meningkat karena dapat memperluas pasar dan mendorong spesialisasi.
- b) David Ricardo menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar akan menimbulkan kelebihan tenaga kerja dan penurunan upah, sehingga perekonomian menjadi stagnan.
- c) Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan kekurangan pangan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Ekonomi Neoklasik

Sebagai pengembangan lebih lanjut dari pemikiran klasik, ekonomi neoklasik lebih menekankan pada perilaku individu sebagai pengambil keputusan ekonomi. Aliran pemikiran ini mengasumsikan bahwa konsumen dan produsen bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepuasan dan keuntungan mereka. Dari perspektif neoklasik, harga timbul dari interaksi preferensi konsumen dan struktur biaya produksi melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Selain itu, analisis marjinal merupakan alat terpenting untuk menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan ekonomi di bawah keterbatasan sumber daya (Rahman, 2016). Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk dan pembentukan modal:

- a) David Ricardo menekankan bahwa tingkat tabungan yang tinggi akan meningkatkan modal dan output yang dihasilkan.
- b) Joseph Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan inovasi dan kewirausahaan.
- c) Teori Harrod-Domar menekankan pentingnya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

2.1.2.3. Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan data PDRB yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). PDRB menjadi indikator utama untuk menilai kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, banyak negara berupaya memperkuat kualitas pertumbuhannya agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Laju pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Rumus perhitungannya adalah:

$$r = \frac{PDB_t \times PDB_{t-1}}{PDB_{(t-1)}} - 100\%$$

r = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDB_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)

$PDB_{(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)

Perhitungan dapat dilakukan per triwulan atau per tahun. Jika hasilnya positif, berarti perekonomian tumbuh. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan

kontraksi, dan kontraksi yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan resesi. PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu lapangan usaha, pengeluaran, dan pendapatan.

2.1.3. Upah Minimum

2.1.3.1. Pengertian Upah Minimum

Menurut pasal 1 ayat 30 undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Maimun, 2007), upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja atau buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

- a) Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan.
- b) Upah yang telah diterima oleh pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang.
- c) Upah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
- d) Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Upah minimum terbagi atas:

1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota. Besar upah ini tiap wilayah provinsi atau kabupaten atau kota tidak sama, tergantung nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah yang bersangkutan. Setiap kabupaten atau kota tidak boleh menetapkan upah minimum dibawah upah minimum di provinsi yang bersangkutan.
2. Upah minimum berdasarkan sektor atau sub sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1989 pada pasal 1 huruf (a) tentang pengertian upah minimum (Maimun, 2007) disebutkan bahwa upah minimum adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Komposisi upah pokok serendah-rendahnya 75 persen dari upah minimum.

2.1.3.2. Faktor yang Memengaruhi Tingkat Upah

Dari jurnal (Zakinah et al., 2022), menurut Heidjerachman Ranupanjodo dan Suad Husnan (1990), mengemukakan faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah:

- 1) Ketika suatu jenis pekerjaan memiliki tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, untuk pekerjaan atau jabatan dengan penawaran tenaga kerja yang melimpah, upah cenderung lebih rendah. Dalam konteks tenaga kerja, permintaan merupakan hubungan antara tingkat upah yang dari sudut pandang pengusaha dipandang sebagai harga tenaga kerja. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan hanya sedikit tenaga kerja yang tersedia, permintaan yang tinggi

terhadap tenaga kerja tersebut akan mendorong peningkatan upah (Don Bellante dan Mark Jacson, 1983).

- 2) Organisasi Buruh. Ada tidaknya organisasi buruh serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah.
- 3) Kemampuan Untuk Membayar. Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi, tetapi pada akhirnya realisasi pemberian upah tergantung juga kepada kemampuan membayar dari perusahaan.
- 4) Produktivitas. Upah sebenarnya merupakan imbalan atas jasa atau prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan seharusnya besar pula tingkat upah yang akan diterima. Prestasi ini biasanya dinyatakan dengan produktivitas
- 5) Biaya hidup. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah biaya hidup di kota kota besar, di mana biaya hidup tinggi upah cenderung juga tinggi, bagaimanapun tampaknya biaya hidup merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

2.1.3.3. Teori Upah

Hubungan antara upah minimum dan tingkat pengangguran dapat dijelaskan menggunakan dua pendekatan utama. Menurut teori klasik atau neoklasik, menetapkan upah minimum di atas tingkat keseimbangan pasar menyebabkan keketatan upah (*wage rigidity*). Hal ini meningkatkan biaya produksi perusahaan dan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja. Akibatnya, tingkat ketersediaan tenaga kerja menurun dan risiko pengangguran meningkat (Erlangga et al., 2024).

Di sisi lain, teori upah efisiensi (*Efficiency Wage Theory*) menyatakan bahwa membayar upah di atas tingkat pasar sebenarnya dapat menguntungkan bagi perusahaan. Upah yang lebih tinggi diyakini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, mengurangi tingkat pergantian karyawan, menarik lebih banyak pelamar yang kompeten, serta meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja (Agusalim & Novianti, 2023). Oleh karena itu, menaikkan upah minimum tidak selalu berdampak negatif pada lapangan kerja. Dalam kondisi tertentu, menaikkan upah minimum bahkan dapat menyebabkan peningkatan lapangan kerja.

2.1.4. Angkatan Kerja

2.1.4.1. Pengertian Angkatan Kerja

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik, 2021) untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan dua informasi utama, yaitu:

- a) Jumlah penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun.
- b) Penduduk usia 15–64 tahun yang tidak ingin bekerja, seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun pengangguran sukarela, yang dikategorikan sebagai penduduk bukan angkatan kerja.

Dengan demikian, jumlah angkatan kerja pada suatu periode diperoleh dari jumlah penduduk usia kerja dikurangi penduduk bukan angkatan kerja. Secara umum, tenaga kerja terbagi ke dalam dua kategori, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

a. Angkatan Kerja

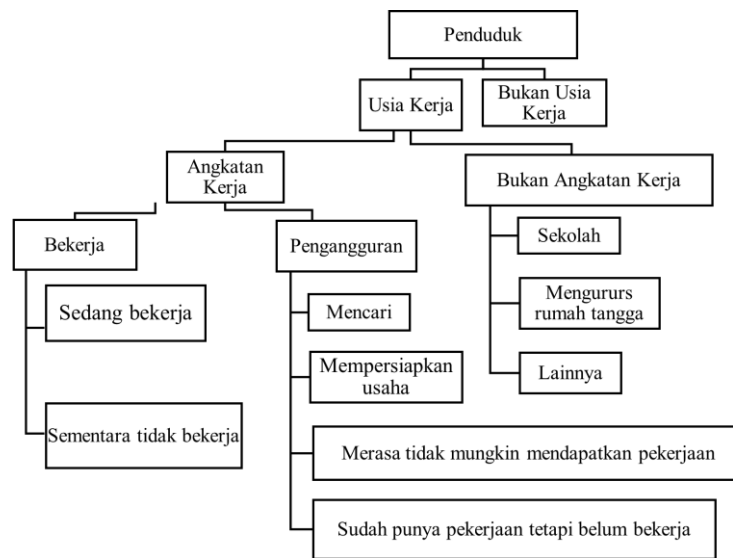
Angkatan kerja adalah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas yang pada minggu sebelumnya bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (Badan Pusat Statistik, 2021). Angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja dan pengangguran.

Pengangguran mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Kelompok ini dikategorikan sebagai pengangguran terbuka.

Sementara itu, penduduk bekerja adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu terakhir. Penduduk bekerja terbagi menjadi pekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, kecuali pekerja yang sementara tidak bekerja.

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang selama seminggu terakhir hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lain yang tidak tergolong bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sementara tidak bekerja (Badan Pusat Statistik, 2021). Kelompok ini dapat masuk ke pasar kerja sewaktu-waktu sehingga disebut *potential labor force*.



Gambar 2.1 Skema Ketenagakerjaan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut Badan Pusat Statistik, daya serap tenaga kerja dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi:

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lainnya.
2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
3. Proporsi biaya tenaga kerja terhadap total biaya produksi.
4. Ketersediaan faktor produksi pelengkap lainnya.

2.1.4.2. Teori Angkatan Kerja

Beberapa teori yang relevan dalam pembahasan ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:

1. Teori Klasik – Adam Smith

Adam Smith (1729–1790) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh alokasi sumber daya manusia yang efektif. Akumulasi modal diperlukan setelah ekonomi tumbuh untuk mempertahankan perkembangan ekonomi. Menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan

menurunkan tingkat pengangguran, sehingga terdapat hubungan positif antara keduanya (Habibi et al., 2024).

2. Teori Keynes

John Maynard Keynes (1883–1946) mengemukakan bahwa pasar tenaga kerja tidak bekerja sepenuhnya sesuai pandangan klasik. Serikat pekerja cenderung meminta upah lebih tinggi, sehingga beban biaya perusahaan meningkat. Ketika kapasitas produksi bertambah tanpa diikuti permintaan yang memadai, terjadi surplus produksi yang menyebabkan penurunan output.

Keynes berpendapat bahwa penurunan upah jarang terjadi. Bahkan jika upah turun, pendapatan masyarakat juga berkurang, sehingga konsumsi menurun. Penurunan konsumsi menyebabkan daya beli turun, harga turun, nilai produktivitas marginal tenaga kerja menurun, dan pada akhirnya permintaan tenaga kerja semakin kecil. Dengan demikian, pengangguran terutama disebabkan rendahnya permintaan agregat, bukan karena masalah produksi (Wulandari & Woyanti, 2023).

3. Teori Malthus

Thomas Robert Malthus (1766–1834) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan produksi terutama sektor pertanian. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia sehingga memunculkan pengangguran (Rusydin & Wijaya, 2024).

4. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar (1946) menyatakan bahwa investasi memiliki dua fungsi: meningkatkan permintaan dan memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas

produksi yang meningkat harus diimbangi permintaan yang cukup untuk mencegah terjadinya surplus dan penurunan output (Arisusanti, 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Badan Pemeriksa Keuangan, 2003)

2.1.5. Belanja Daerah

2.1.5.1 Pengertian Belanja Daerah

Dalam setiap sistem ekonomi, pemerintah memainkan peran penting dalam melaksanakan berbagai pengeluaran untuk memenuhi kewajiban publik dan mendorong pembangunan. Pengeluaran ini meliputi pembiayaan administrasi pemerintah, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembiayaan pasukan keamanan seperti polisi dan tentara. Pengeluaran ini bersifat esensial dan tidak dapat dihindari untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan aktivitas ekonomi dan social (Madyoningrum, 2025). Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk mengumpulkan pendapatan guna membiayai semua pengeluaran, baik langsung maupun tidak langsung.

Untuk memastikan bahwa dana publik dikumpulkan dan digunakan secara terarah dan akuntabel, pemerintah menyusun anggaran negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN). Di tingkat daerah, instrumen anggaran ini disebut anggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD). Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan

peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan peraturan tersebut, pengeluaran daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan aset bersih dalam periode anggaran (Rahmayanti et al., 2025).

Dalam jurnal oleh (Rahmayanti et al., 2025) juga mendefinisikan pengeluaran daerah sebagai seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama tahun anggaran tertentu. Definisi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur bahwa pengeluaran daerah meliputi seluruh kewajiban daerah yang harus dimasukkan dalam anggaran daerah, disertai dengan alokasi dan pelaksanaan anggaran pada periode sebelumnya. Selain itu, pengeluaran daerah diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu pengeluaran tidak langsung dan pengeluaran langsung. Pengeluaran tidak langsung meliputi pengeluaran personel, pengeluaran bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, pembagian pendapatan dengan pemerintah provinsi/daerah/kota dan desa, bantuan keuangan, dan pengeluaran tak terduga. Pengeluaran langsung meliputi pengeluaran personel, pengeluaran barang dan jasa, serta pengeluaran investasi yang langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah (Rahmayanti et al., 2025).

2.1.5.2 Jenis Belanja Daerah

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, dan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja dapat diukur dengan jelas. Oleh karena itu, pengeluaran langsung mencerminkan hubungan langsung antara alokasi dana dan hasil yang diinginkan oleh pemerintah daerah (Ma'ruf & Andriansyah, 2022). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengeluaran langsung dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Belanja Pegawai, yaitu biaya untuk gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah (Hardiana, 2023).
- 2) Belanja Barang dan Jasa, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan masa manfaat kurang dari 12 bulan, termasuk pengeluaran untuk barang habis pakai, layanan kantor, sewa fasilitas dan infrastruktur, perjalanan dinas, dan kebutuhan operasional lainnya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah (Rahmayanti et al., 2025).
- 3) Belanja Modal, yaitu pengeluaran untuk pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, seperti tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, sistem irigasi, dan jaringan lainnya. Nilai yang diperkirakan dalam pengeluaran modal hanya mencakup biaya akuisisi aset, sementara biaya administrasi dan

komisi pengadaan dialokasikan ke biaya personel atau biaya barang dan jasa (Kelen, 2025).

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan lembaga pemerintah daerah (SKPD). Jenis pengeluaran ini harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah terlepas dari adanya atau tidak adanya kegiatan tertentu, sehingga bersifat rutin dan wajib dalam struktur anggaran daerah (APBD) (Ma'ruf & Andriansyah, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran tidak langsung dibagi menjadi komponen-komponen utama sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai, yaitu pengeluaran yang digunakan sebagai imbalan bagi pegawai negeri sipil dalam bentuk gaji, tunjangan, dan penghasilan lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum (Hardiana, 2023).
- 2) Belanja Bunga, yaitu pengeluaran yang dimaksudkan untuk pembayaran bunga atas utang pokok pemerintah daerah dari pinjaman jangka pendek, menengah, dan Panjang (Lativa, 2021).
- 3) Belanja Subsidi, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai produksi perusahaan atau lembaga tertentu agar harga barang dan/atau jasa yang dihasilkan terjangkau bagi masyarakat umum. Anggaran subsidi disesuaikan dengan kebutuhan penerima dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD (Kelen, 2025).

- 4) Belanja Hibah merupakan subsidi yang tidak mengikat dan tidak berkelanjutan, penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan perjanjian hibah daerah (Rahmayanti et al., 2025)
- 5) Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa uang dan/atau barang kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak diulang setiap tahun anggaran, dan memiliki tujuan yang jelas (Ma'ruf & Andriansyah, 2022).
- 6) Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk distribusi pendapatan daerah kepada pemerintah daerah lain, seperti dari provinsi ke kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota ke pemerintah desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hardiana, 2023).
- 7) Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan umum atau khusus yang diberikan antara pemerintah daerah sebagai bagian dari distribusi yang adil dan peningkatan kapasitas keuangan daerah. 1 Bantuan umum dikelola sepenuhnya oleh penerima, sementara pengelolaan bantuan khusus ditentukan oleh pemerintah pemberi (Ma'ruf & Andriansyah, 2022).
- 8) Belanja Tidak Terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai tindakan darurat dan tak terduga, seperti menanggapi bencana alam, bencana sosial, dan mengembalikan surplus dari pendapatan daerah pada tahun-tahun sebelumnya (Lativa, 2021).

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pendukung landasan teori dan kerangka pemikiran dalam penelitian. Peneliti mengkaji beberapa jurnal yang

relevan dengan judul yang digunakan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dan penguatan argumentasi dapat dilihat di tabel.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No (1)	Judul & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil penelitian (5)	Sumber (6)
1	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Indonesia Noni Rozaini dan Marcell E R Sinaga (2023)	Variabel Independen: - Pertumbuhan ekonomi - Upah Minimum	Variabel Independen: - Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia.	Samuka. Vol. 7, No. 2 : hlm. 290-300 SAMUKA Jurnal Samudra Ekonomika https://ejurnalnsam.id/index.php/jse
2	Analisis Pengaruh Investasi, Upah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi Di Indonesia Luh Made Arisusanti (2023)	Variabel Independen : - Pertumbuhan ekonomi - Upah Minimum	Variabel Independen : - Investasi	Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi di Indonesia.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 06 (2023); Vol. 12, No. 06, Juni 2023
3	<i>Analysis of the Influence of Economic Growth, Average Length of Schooling, and Provincial Minimum Wage on the Open Unemployment Rate (TPT) in 6 Provinces of Java</i> Muhammad Adib Habibi, Muhammad Taufiq, Annisa Fitria Utami (2024)	Variabel Independen : - Pertumbuhan ekonomi - Upah minimum	Variabel Independen : - Rata-rata Lama Sekolah	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Journal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Vol: 1, No 3, 2024, Page: 1-9
4	Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka Di	Variabel Independen : - Pertumbuhan ekonomi	Variabel Independen : - Inflasi - Penyerapan tenaga kerja	Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6, No. 1, Februari 2022, pp. 49-58

No (1)	Judul & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil penelitian (5)	Sumber (6)
	Provinsi Banten Tahun 2000-2020 Fandi Chandra Irawan (2022)				
5	<i>Impact of Economic Growth, Minimum Wage, Labor Force Participation Rate, and Population Size on the Open Unemployment</i>	Variabel Independen : - Pertumbuhan ekonomi - Upah minimum - TPAK	Variabel Independen : - Jumlah penduduk	Secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan TPAK memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan, sementara upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka.	<i>Journal of Business Management and Economic Development</i> , Vol 2 Issue 03, September 2024, Pp. 1186-1198
	Raden Muhammad Rusydan dan Riko Setya Wijaya (2024)				
6	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Bantul	Variabel Independen : - Pertumbuhan ekonomi	Variabel Independen : - Rata-rata Lama Sekolah	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Jurnal Riset Daerah Vol. XXI, No.4. Desember 2021
	Dionysius Desembriarto (2021)				
7	Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pdrb, Upah Minimum, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur	Variabel Independen : - Upah Minimum - Angkatan Kerja	Variabel Independen : - PDRB - Rata-rata Lama Sekolah	Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan, variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur.	MATHunesa Jurnal Ilmiah Matematika e-ISSN : 2716-506X p-ISSN : 2301-9115 Volume 13 No 01 Tahun 2025
	Nabila Khoirunnisa dan Imam Rofiki (2025)				
8	<i>The effects of minimum wage on unemployment for OECD countries: a dynamic fixed effects panel thres</i>	Variabel Independen : - Upah minimum	Variabel Independen : - PDB	Upah minimum memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pengangguran (menurunkannya), dengan efek yang lebih	<i>Economic Research-Ekonomika Istraživanja</i> 2023, VOL. 36, NO. 3, 2217880

No (1)	Judul & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil penelitian (5)	Sumber (6)
	<i>hold model perspective</i> María del Carmen Ramos-Herrera (2023)			kuat di atas ambang batas tertentu.	
9	Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pengangguran Di Indonesia Sarito Pasuria dan Nunuk Triwahyuningtyas (2022)	Variabel Independen : - Angkatan kerja - Upah Minimum	Variabel Independen : - PDRB	Pendidikan berpengaruh negatif signifikan, Angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh positif signifikan sedangkan PDB tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran	SIBATIK JOURNAL VOLUME 1 NO.6 (2022). DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.94
10	Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat. Anisa Fatmawati dan Setia Verayanti Raja Guk Guk (2024)	Variabel Independen : - Upah minimum - Angkatan kerja	Variabel Independen : - PDRB - Rata-rata Lama Sekolah	Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif signifikan sedangkan angkatan kerja dan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.	INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7515-7525 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
11	Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB Dan UMP Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa 2017-2020. Devi Dwi Nuzulaili (2022)	Variabel Independen : - Upah Minimum	Variabel Independen : - Inflasi - PDRB	UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6, No. 2, Mei 2022, pp. 228-238
12	Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2022.	Variabel Independen : - Angktan kerja - Upah minimum	Variabel Independen : - Laju pertumbuhan penduduk	Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan. Sementara upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 7 No 2, 2025 DOI: https://doi.org/10.36985/ywmawh84

No (1)	Judul & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil penelitian (5)	Sumber (6)
	Indri Dwi Lestari dan Aprillia Nilasari (2025)				
13	Pengaruh PDRB, Belanja Daerah, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara.	Variabel Independen : - Belanja Daerah - Upah Minimum	Variabel Independen : - PDRB	Secara parsial variabel Upah berpengaruh positif dan signifikan dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.	Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Ekonomi Regional Unimal. DOI: https://doi.org/10.29103/jeru.v7i2.20880
	Apnia Dumaris Pubra dan Tarmizi Abbas (2024)				
14	Determinan Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa.	Variabel Independen : - Upah Minimum	Variabel Independen : - Tingkat pendidikan - PMDN	Secara parsial menunjukkan bahwa variabel UMR berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terdidik.	Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) ISSN: 2302-9595, e-ISSN: 2721-6071. Vol 10 No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3 Tahun 2021
	Leni Anjarwati dan Whinarko Juliprijanto (2021)				
15	Pengaruh Kondisi Demografi, Ketenagakerjaan, Dan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Indonesia	Variabel Independen : - Jumlah Angkatan Kerja - Upah Minimum	Variabel Independen : - PDRB - Jumlah Penduduk	variabel upah dan jumlah angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik lulusan SMA/SMK/Sederaja di Indonesia.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 10 No. 2.
	Fatma Shafira Nurul Ramadhani (2021)				
16	Pengaruh Bonus Demografi Dan Industrialisasi Terhadap Pengangguran Terdidik Usia Muda Di Indonesia Tahun 2018-2022.	Variabel Independen : - Upah Minimum	Variabel Independen : - Rasio Ketergantungan - PDRB Sektor Industri - PDRB Sektor Agraris	Upah rata-rata pekerja memengaruhi pengangguran terdidik usia muda di Indonesia Tahun 2018-2022	Prosiding Seminar Nasional Official Statistics (ISSN: 27221970, EISSN: 27221970) Vol 2024 No 1 (2024):
	Fadhila Ramadhani Gita Putri dan Atik Mar'atis Suhartini (2024)				
17	Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Kesempatan Kerja Sektor Formal Terhadap Pengangguran	Variabel Independen : - Upah Minimum	Variabel Independen : - Pendidikan - Kesempatan kerja sektor formal	Secara parsial, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan dan tingkat kesempatan kerja sektor formal berpengaruh negatif	BISECER (Business Economic Entrepreneurship) Vol 6, No 2 (2023)

No (1)	Judul & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil penelitian (5)	Sumber (6)
	Terdidik di Provinsi Jawa Barat (2017-2021). Desy Wulandari dan Nenik Woyanti (2023)			dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Barat. Kata	E-ISSN: 2714-9986 P-ISSN: 2599-3097
18	<i>Analysis Of The Effect Of Hdi, Regional Minimum Wage And Labor Force Participation Rate On Open Unemployment In Indonesia.</i> Cinta Marito Simbolon, Reynalda Utari Karo Karo, Datuk Sazli Daffa dan Nasrullah Hidayat (2023)	Variabel Independen : - Angkatan kerja	Variabel Independen : - IPM	UMP berpengaruh positif signifikan sedangkan PTAK tidak berpengaruh terhadap TPT	Journal of Social and Economics Research (JSER). Vol. 5, Issue 2, December 2023: 451-463
19	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Jambi Tahun 2014-2024. Yoega Maulana Jorand, Asrini dan Irmanelly (2025)	Variabel Independen : - Pertumbuhan ekonomi	Variabel Independen : - Rata-rata Lama Sekolah	Semua variabel x termasuk pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di kota Jambi.	Jurnal Ekonomi dan Manajemen. eISSN 3048-3573 : pISSN 3063-4989 Vol. 2, No. 2b, Tahun 2025 doi.org/10.62710/hq2xn746 Hal. 4344-4355
20	<i>Effectiveness of Regional Government Expenditure in Reducing Unemployment and Poverty Rate</i> AkhmadAkhmad, AmirAmir, Syafiuddin Saleh, dan Zainal Abidin (2022)	Variabel Independen : - Belanja daerah	Variabel Independen : - Investasi - Kemiskinan - PDRB - Inflasi - IPM	Pengeluaran pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap investasi swasta, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.	European Journal of Development Studies www.ej-develop.org ISSN: 2736-660X DOI: 10.24018/ejdevelop.2022.2.4.129

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang mengidentifikasi dan menentukan hubungan antar variabel yang akan dipelajari dan teori yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Oleh karena itu, kerangka pemikiran merupakan sintesa dari hubungan antar variabel yang disusun menurut berbagai teori yang telah dijelaskan (Sugiyono & Prasetyawati, 2019). Kerangka pemikiran penelitian ini dibutuhkan untuk memudahkan penulis dan menggambarkan keterkaitan antara laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, jumlah angkatan kerja dan belanja daerah terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Barat periode 2020-2024.

2.2.1. Hubungan antara Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Jumlah Pengangguran Terdidik

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan output dan pendapatan suatu wilayah yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan Hukum Okun, terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, di mana peningkatan aktivitas ekonomi akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Secara empiris, penelitian oleh Habibi, Taufiq & Utami menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa, termasuk Jawa Barat, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran (Habibi et al., 2024). Pertumbuhan yang meningkat mendorong perluasan industri dan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan jasa. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian ini, di mana pertumbuhan ekonomi menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dapat secara efektif mengurangi tingkat pengangguran sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Okun.

2.2.2. Hubungan antara Upah Minimum dengan Jumlah Pengangguran Terdidik

Upah minimum adalah batas bawah upah dan gaji yang ditetapkan oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat perlindungan sosial bagi karyawan, namun di sisi lain juga merupakan komponen biaya tenaga kerja yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dari perspektif teori permintaan tenaga kerja klasik, upah dianggap sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga kenaikan upah minimum di atas tingkat keseimbangan pasar menyebabkan perusahaan menyesuaikan biayanya melalui peningkatan efisiensi, termasuk pengurangan permintaan tenaga kerja. Situasi ini membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam merekrut pekerja baru (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum memiliki korelasi positif dengan tingkat pengangguran. Studi oleh (Arisusanti, 2023) menyimpulkan bahwa kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan pengangguran, karena perusahaan cenderung mengurangi biaya operasional dengan menahan diri dalam merekrut pekerja baru. Dalam konteks ini, upah minimum yang tinggi dalam konteks pengangguran di kalangan orang terpelajar dapat menyebabkan perusahaan enggan mempekerjakan pekerja baru, terutama lulusan universitas yang masih memiliki pengalaman profesional yang relatif sedikit. Akibatnya, pekerja terampil berisiko lebih tinggi mengalami pengangguran

meskipun tingkat pendidikannya lebih tinggi, karena ekspektasi upah mereka tidak sebanding dengan produktivitas awal mereka.

2.2.3. Hubungan antara Angkatan Kerja dengan Jumlah Pengangguran Terdidik

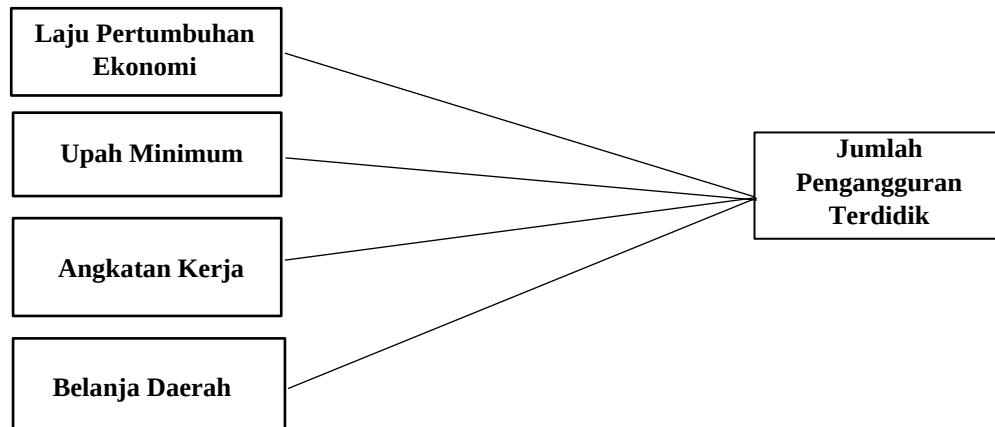
Tenaga kerja mencerminkan jumlah orang usia kerja yang sudah bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan, dan oleh karena itu mewakili pasokan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Menurut teori pasokan tenaga kerja, peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan kerja akan menyebabkan kelebihan pasokan tenaga kerja. Situasi ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat di antara pencari kerja, terutama bagi lulusan perguruan tinggi dengan karakteristik dan ekspektasi tertentu terhadap pasar tenaga kerja.

Studi oleh Fatma Shafira Nurul Ramadhani menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja berkorelasi positif dengan tingkat pengangguran terdidik, terutama ketika sektor produktif tidak mampu menyerap tenaga kerja tambahan yang masuk ke pasar tenaga kerja (Ramadhani, 2021). Pasuria dan Triwahyuningtyas mencapai kesimpulan serupa, menemukan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja berkontribusi signifikan terhadap kenaikan tingkat pengangguran, bahkan di kalangan pekerja yang berpendidikan tinggi (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022). Temuan ini mendukung hipotesis penelitian bahwa jumlah pengangguran yang berpendidikan tinggi cenderung meningkat ketika jumlah pekerja berpendidikan tinggi yang masuk ke pasar tenaga kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru.

2.2.4. Hubungan antara Belanja Daerah dengan Jumlah Pengangguran Terdidik

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling penting, mencerminkan aktivitas pengeluaran pemerintah daerah, baik untuk pengeluaran operasional saat ini maupun pengeluaran modal. Dalam kerangka teori Keynesian, khususnya konsep pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah memainkan peran penting sebagai instrumen untuk mendorong permintaan agregat. Peningkatan pengeluaran daerah, terutama di sektor-sektor produktif, diharapkan memiliki efek multiplier yang merangsang aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang kerja.

Secara empiris, hasil penelitian oleh Pubra dan Abbas, yang menunjukkan bahwa pengeluaran regional memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran, terutama ketika anggaran difokuskan pada pengeluaran pembangunan dan investasi (Pubra & Abbas, 2024). Studi ini konsisten dengan hipotesis bahwa pengeluaran regional kemungkinan memiliki dampak negatif terhadap jumlah lulusan yang menganggur, karena peningkatan pengeluaran pemerintah daerah kemungkinan akan mengarah pada penciptaan proyek-proyek pembangunan.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Dari rumusan permasalahan yang ada, dirumuskan hipotesis:

1. Diduga laju pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh negatif sedangkan upah minimum dan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran terdidik di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024.
2. Diduga laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, jumlah Angkatan kerja dan belanja daerah secara bersama berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024.